

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|--------|
| Media Online | |
| Media Cetak | Kompas |

Data Ribuan Penerima Bansos Dicoret

Sebanyak 25.185 warga DKI Jakarta dinilai tidak layak menerima bantuan sosial, antara lain, karena dianggap mampu secara ekonomi.

JAKARTA, KOMPAS — Dinas Sosial DKI Jakarta menyisir dan memadankan data penerima bantuan sosial yang sudah ada dan calon penerima bansos pemenuhan kebutuhan dasar. Dari proses tersebut, 194.067 warga dinilai layak, sedangkan 25.185 warga lainnya dinilai tidak layak menerima bansos.

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menargetkan 219.252 warga sebagai penerima bantuan sosial (bansos) pemenuhan kebutuhan dasar pada 2024. Bansos ini terdiri dari Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).

Proses tersebut dimulai dengan memadankan data 63.698 penerima bansos yang sudah ada dan 155.554 calon penerima bansos dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) berstatus layak pada sistem Kementerian Sosial. Pemadanan kemudian berlanjut dengan data kependudukan Kementerian Dalam Negeri guna mendapatkan status meninggal dan pindah ke luar DKI Jakarta.

Sesudah itu, data dipadankan dengan data Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta untuk mengetahui kepemilikan aset, seperti mobil dan nilai jual obyek pajak (NJOP) di atas Rp 1 miliar. Terakhir, data penerima bansos ini dipadankan lagi dengan data warga binaan sosial (WBS) panti sosial dan data registrasi sosial ekonomi (reg-sosek) untuk mendapatkan status peringkat kesejahteraan dalam bentuk desil.

"Sebelum menetapkan penerima bansos, kami memadankan data. Lalu memverifikasi

dan memvalidasinya ke lapangan. Salah satunya memastikan bahwa penerima bansos adalah warga DKI Jakarta dan berdomisili di Jakarta," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Premi Lasari, Minggu (2/6/2024).

Secara keseluruhan, dari target 219.252 warga penerima bansos, 194.067 warga di antaranya dinyatakan layak menerima. Mereka ini terdiri dari 149.549 penerima KLJ, 18.033 penerima KPDJ, dan 26.485 penerima KAJ. Sementara itu, sebanyak 25.185 warga dinyatakan tidak layak menerima bansos karena dinilai mampu, memiliki mobil, memiliki NJOP di atas Rp 1 miliar, dan datanya tidak sesuai ketika dipadankan.

Premi menambahkan, mereka yang tidak layak secara otomatis tidak menerima bansos sebagaimana persyaratan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Perlindungan Sosial. Alokasi anggaran bansos disesuaikan dengan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2024.

Selanjutnya, katanya, Dinas Sosial DKI Jakarta akan menyalurkan dana selama empat bulan kepada penerima bansos yang sudah ada tahap I. Kemudian, Bank DKI bakal mendistribusikan kartu anjungan tunai mandiri (ATM) kepada pra-penerima bansos baru melalui dua kali pemanggilan, yakni saat hari kerja dan akhir pekan, sejak pekan keempat Juni 2024 hingga pekan kedua Agustus 2024.

Setelah itu, penerima bansos

yang sudah ada tahap II dan penerima bansos baru akan menerima dana selama enam bulan berdasarkan laporan hasil pendistribusian dari Bank DKI. Penyaluran dana mulai Januari sampai Juni 2024.

Pemutakhiran data

Bansos ditengarai kerap salah sasaran sehingga pemadanan data terus dilakukan, termasuk pemutakhiran data. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, misalnya, tengah menjalankan penertiban administrasi kependudukan berupa penonaktifan nomor induk kependudukan (NIK) warganya yang tinggal tidak sesuai dengan alamat kartu tanda penduduk (KTP) serta mengkaji pembatasan keluarga dalam satu kartu keluarga.

Sehubungan dengan bansos ini, sejumlah warga miskin Jakarta berunjuk rasa menuntut pemerataan bansos di Kemensos dan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (14/12/2022). Mereka menuntut kemudahan akses warga miskin terhadap bansos dan akuntabilitas data penerima.

Koalisi Warga Jakarta saat itu setidaknya menerima laporan 5.000 keluarga miskin di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Lampung sudah terdaftar pada DTKS, tetapi belum mendapatkan bansos.

Pemprov DKI Jakarta juga mencatat, bansos yang diberikan kepada 1.143.639 warganya yang masuk dalam DTKS tidak tepat sasaran. Data ini berdasarkan hasil pemutakhiran DTKS terhadap 5.327.074 warga pada Februari 2022 melalui musyawarah kelurahan pada Juni 2022.

Tak hanya itu, ribuan pene-

rima bansos juga dicoret dalam evaluasi penerima bansos yang bersumber dari APBD Jakarta pada Juli 2023. Yang dicoret itu, rinciannya, 6.107 penerima KLJ, 282 penerima KPDJ, 3 penerima KAJ, dan 3 penerima Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta (KPARJ).

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengatakan, data administrasi kependudukan harus tepat agar bansos tepat sasaran, yakni warga yang memang membutuhkan. "Pemprov DKI Jakarta ingin APBD digunakan dengan efisien," ujarnya.

Kini mekanisme pengusulan penerima bansos dalam DTKS wajib disaring melalui musyawarah desa atau kelurahan, disetujui oleh pemerintah daerah, dan diserahkan kepada Kemensos. Hal ini guna meningkatkan partisipasi warga yang diputuskan secara mufakat dan memastikan pendataan dilakukan dengan benar dan bansos tepat sasaran (*Kompas*, 8 Mei 2024).

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, menyebut, mekanisme tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi Ombudsman pada awal tahun lalu untuk menghindari maladministrasi terulang. Hal ini karena di banyak daerah proses pendataan penerima bansos tidak dilakukan melalui prosedur musyawarah desa atau kelurahan.

Namun, mekanisme itu tidak sepenuhnya menjamin pendataan penerima bansos bisa 100 persen tepat sasaran. Sebab, butuh komitmen dari pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi faktual terhadap data hasil musyawarah. (DAN)